



Media: Radar

Hari: Senin

Tanggal: 08 Agustus 2022

Halaman: 4

Antara Sengkuni, PBSI, dan Raih Prestasi Porda

Pekan Olahraga Daerah (Porda) XVI DIY kurang dari sebulan lagi. Ajang olahraga provinsi itu berlangsung di Sleman mulai 1 hingga 9 September 2022. Ada hal menarik yang perlu dicermati dari kontingen Kota Jogja. Khususnya menyangkut cabang olahraga (cabor) bulutangkis.

PENULIS mendengar kegelisahan menyangkut atlet yang akan berlaga di cabor tersebut. Dari penelusuran penulis, ada indikasi lima atlet putri yang mewakili KONI Kota Jogja berasal dari luar provinsi. Informasinya dari DKI Jakarta. Lima atlet putri itu belum pernah sekalipun datang ke Jogja. Kalau informasi itu benar,

menjadi pertanyaan awam. Mereka sedang mengikuti kompetisi atau wisata Porda?

Selanjutnya, lagi-lagi menjadi pertanyaan penulis. Dikemungkinan pembinaan klub-klub bulutangkis di Kota Jogja. Selama ini, harapan klub maupun orang tua atlet, Porda menjadi tolok ukur pembinaan. Kalau kemudian harus mengambil atlet impor, bagaimana mekanisme membuat surat pertanggungjawaban (SPJ) anggaran yang bersumber dari uang negara agar tidak menimbulkan permasalahan hukum? Perlu diingat, sumber dana pembinaan dari Pemkot Jogja yang diberikan melalui KONI Kota Jogja.

Mengantisipasi hal tersebut, penulis berharap agar ketua PBSI Kota Jogja agar bisa bertindak terbit administrasi. Apalagi beliau juga memegang posisi di satuan kerja yang berhubungan dengan penegakan hukum. Janganlah men-

Oleh:
Dr. Sukanto
*Ketua Masyarakat Peduli
 Olahraga Yogyakarta*

jalankan kebijakan organisasi yang tidak bisa diteladani.

Kalau dibiarkan, pembinaan prestasi olahraga bulutangkis di Kota Jogja bisa mati. Orang tua atlet telah lelah mendorong anaknya agar berprestasi. Klub-klub menjadi ogah-ogahan. Porda sebenarnya menjadi ajang evaluasi dalam melatih atlet. Harapannya bisa tampil di Porda. Namun yang terjadi sekarang, mereka dibayang-bayangi atlet impor.

Masukan juga penulis sampaikan kepada kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang membidangi pembinaan terhadap KONI Kota Jogja. Mohon agar diperhatikan laporan

pertanggungjawaban (LPJ) KONI yang di dalamnya ada PBSI. Bagaimana atlet yang belum pernah ke Jogja tapi mendapatkan fasilitas yang sama dengan atlet yang latihan di kota pelajar ini. Masukan ini semata-mata penulis sampaikan agar tidak ada masalah hukum di kemudian hari.

Penulis juga perlu mengingatkan, ketua umum KONI Kota Jogja juga ikut bertanggung jawab. Kejadian ini dapat dibaca sebagai gejala kemunduran pembinaan bulutangkis. Sejarahnya bakal mencatatnya. Meski dalam kepengurusan ada bidang pembinaan prestasi (Binpres). Apa yang sudah dilakukan Binpres?

Ibarat cerita Mahabarat, dalam karut marut ini jangan sampai ada sengkuni-sengkuni yang hendak mencari posisi di PBSI maupun KONI. Lebih-lebih hal itu juga terjadi PBSI empat kabupaten se-DIY maupun PBSI DIY.

Penulis mengajak semua pihak harus waspada. Berhati-hati jangan mudah terpengaruh atau dipengaruhi. Ingat, posisi di PBSI adalah murni jabatan organisasi olahraga amatir. Tidak ada kaitannya dengan jabatan struktural.

Lewat tulisan ini penulis mengajak para orang tua atlet, simpatisan olahraga bulutangkis, pembina, pelatih dan akademisi menghentikan praktik culas dalam setiap penyelenggaraan olahraga. Porda adalah pesta olahraga daerah. Gunakan atlet binaanya sendiri. Jangan mengimpor atlet dari luar daerah.

Apalagi kalau kontingen Kota Jogja gagal meraih prestasi membanggakan, ketua umum KONI Kota Jogja sebaiknya berse-dia mundur. Demi pertanggungjawaban moral. Mari bersatu padu memajukan olahraga bulutangkis di Kota Jogja agar bisa menembus prestasi nasional dan internasional. (***)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 26 Juni 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005